



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 11/I/TAHUN 2024
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Bupati Tana Toraja yang terarah, terpadu, terprogram dan sesuai prioritas, perlu disusun perencanaan penyusunan peraturan bupati dalam program pembentukan peraturan bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati Tana Toraja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA** : Penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 13 Januari 2024

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLOREERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Tempat;
3. Direktur RSUD Lakipadada di Makale;
4. Para Kepala Bagian Lingkup Setda di Tempat.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	INSTANSI TERKAIT	KETERANGAN
			BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengelolaan Dana Desa di Lembang Tahun Anggaran 2024	Mengatur Pedoman Pengelolaan Dana Desa Lembang Tahun Anggaran 2024	√	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014	DPML	
2	Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang dari APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024	Mengatur Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang dari APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024	√	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014	DPML	
3	Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, BPL, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2024	Mengatur Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang, BPL, Tambahan Penghasilan Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2024	√	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014	DPML	
4	Tunjangan THR dan Gaji Ketigabelas yang bersumber dari APBD	Mengatur terkait Tunjangan THR dan Gaji Ketigabelas yang bersumber dari APBD	√	-	Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2023	BPKPD	
5	Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informas	√	-	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, PP Nomor 82 Tahun 2012, Perka lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2016	Dinas Kominfo dan Persandian	
6	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Mengatur terkait Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	√	-	Permenpan 1 Tahun 2020	Bagian Organisasi Setda	
7	Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Daerah Tanaman Hutan Rakyat	Mengatur terkait Penyusunan Unit Pelaksanan Teknis Daerah	√	-	Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021, Perda Kab. Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022	Dinas Lingkungan Hidup, Bag Organisasi	
8	Peta Proses Bisnis dan SOP	Mengatur terkait penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP	√	-	Permen PAN dan RB No: 19 Tahun 2018	Bag. Organisasi Setda	
9	Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ASN	Mengatur terkait Penyusunan Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ASN	√	-	Permen PAN dan RB No. 39 tahun 2023	Bag. Organisasi Setda	
10	Peta Jabatan	Mengatur terkait penyusunan Peta Jabatan	√	-	Permen PAN No. 34 tahun 2021	Bag. Organisasi Setda	
11	Pakaian Dinas	Pengaturan mengenai Pakaian Dinas	√	-	Permendagri No. 11 tahun 2020	Bag. Organisasi Setda	

12	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan	Mengatur terkait penyusunan Unit Pelaksana Teknis Daerah	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022	Dinas Lingkungan Hidup, Bag. Organisasi	
13	Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia	Pengaturan mengenai Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia	√	-	Permen Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023	Bagian Hukum	
14	Pedoman Pengelolaan Tenaga Pendukung Pelayanan Non Aparatur Sipil Negara pada BLUD RSUD Lakipadada	1 Masih kurangnya SDM Acuan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Lakipadada		√	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BULD	BPKPD, RSUD, BPKSDM	
		2 Tujuan : Untuk memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan pegawai pada BLUD serta memberikan kepastian hukum bagi pegawai non ASN pada BLUD RSUD Lakipadada					
		3 Ruang Lingkup : Prinsip dasar, tujuan dan sasaran, prosedur pengadaan pegawai					
15	Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Lakipadada	1 Latar Belakang : Sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan biaya pelayanan di BLUD RSUD Lakipadada Lakipadada 2 Tujuan Penyusunan : Memberikan kepastian hukum dalam pemberian pembebasan biaya pelayanan di BLUD RSUD Lakipadada 3 Ruang Lingkup : Maksud dan tujuan, persyaratan pembebasan biaya pelayanan kesehatan	√	-	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	RSUD, Dinas Kesehatan	
16	Pedoman Harga Eceran Tertinggi Obat pada BLUD RSUD Lakipadada	1 Latar Belakang : Untuk menjamin keterjangkauan harga obat di Masyarakat	√		Permenkes Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi	RSUD, Dinas Kesehatan	

		2 Tujuan Penyusunan : Untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai harga eceran tertinggi obat-obatan yang diberikan kepada masyarakat pada instalasi farmasi RSUD Lakipadada					
		3 Ruang Lingkup : Penetapan harga eceran tertinggi obat-obatan di RSUD Lakipadada					
17	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Pengaturan terkait Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	√	-	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD, Bag. Organisasi , BKPSDM	
18	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	√	-	Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
19	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	√	-	Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Badan Kesbangpol	
20	Pencabutan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab. Tana Toraja	Pencabutan Peraturan Bupati	√		Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2023	Bagian Organisasi	
21	Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024	Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan yang digunakan dalam perencanaan dan Pelaksanaan APBD TA 2025	√	-	- Pemendagri No 90 Tahun 2019 - Pemenkeu No. 83/ PMK 02/2022 - Pemendagri No. 77 Tahun 2020 - Pemendagri No. 84 Tahun 2022	BPKPD	
22	RKPD Tahun 2025	a. Pendahuluan b. Gambaran Umum Kondisi Daerah c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g. Penutup	√	-	Permendagri 86 Tahun 2017	Semua OPD	
23	Perubahan RKPD Tahun 2024	a. Pendahuluan b. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 Trw. II c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah e. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan RKPD f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g. Penutup	-	√	Permendagri 86 Tahun 2017	Semua OPD	

24	Adaptasi Perubahan Iklim	a. Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan iklim b. Monitoring dan Evaluasi c. Pembinaan dan Pengawasan d. Peran serta masyarakat e. Pendanaan f. Ketentuan Penutup	√		Sesuai Permen LHK Nomor P33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016	Semua OPD	
25	Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Tana Toraja	Penganggaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Penerima Upah Non ASN dan Pekerja Bukan Penerima Upah melalui APBD Kab. Tana Toraja	√		2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tana Toraja	
26	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas	√		Undang - Undang No. 18 Tahun 2016 tentang hak - hak penyandang Disabilitas Perda Kab. Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas	PRKP, PUTR, Dinas Pariwisata dan Olah Raga, BKKBDP2KP, DPML, DISNARKERTRANS, DINAS KESEHATAN, DUKCAPIL dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial	
27	Kampung dan Lingkungan dalam Kabupaten Tana Toraja	Kampung dan Lingkungan dalam Kabupaten Tana Toraja	√	-	PERDA Nomor 2 Tahun 2013	DPML, Bagian Pemerintahan Setda, Camat dan Lurah/Kepala Lembang	
28	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang	DPML, Bagian Pemerintahan Setda	
29	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun	DPML, Bagian Pemerintahan Setda	
30	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD dan Perangkat Daerah terkait	
31	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan	Proses Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD	

32	Administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya	administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya	√	-	Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPKPD	
33	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	
34	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar	Penyusunan Unit Pelaksana Teknis Daerah terkait perubahan nomenklatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan nama UPT	√	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Organisasi Setda	
35	Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Penyusunan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	√	-	Permen PAN dan RB No. 88 Tahun 2021	Bagian Organisasi Setda	
36	Kelas Jabatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja	Penyusunan Kelas Jabatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja	√	-	Permen PAN dan RB No. 39 Tahun 2013	Bagian Organisasi Setda	
37	Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	- Kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah	√	-	- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat Daerah, BPKPD	
		- Strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian			- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan daerah		
38	Perlindungan Pelapor	- Hak dan tanggung jawab masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan informasi atau pelaporan dalam upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi	√	-	- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Inspektorat Daerah	
		- Peran serta pejabat/ pegawai dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai atas layanan yang diberikan					

39	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023	Mengatur Terkait Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
40	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	Mengatur Terkait Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
41	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	Mengatur Terkait Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	√	-	Pemendagri 77 Tahun 2020	BPKPD	
42	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah	Mengatur terkait penyusunan Unit Pelaksana Teknis Daerah	√	-	Perda Kab. Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022	Dinas Kesehatan, Bag. Organisasi	
43	Sistem Kerja	Mengatur terkait Sistem Kerja	√	-	Permen PAN 7 Tahun 2022	Bag. Organisasi	

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG